

Keanekaragaman Hayati Dipuji Pangeran Charles

Batanghari, Kompas - Ahli waris takhta Kerajaan Inggris, Pangeran Charles, terkesan dengan keanekaragaman hayati kawasan hutan hujan Indonesia. Hal itu tergambar dari kunjungannya ke Hutan Harapan di Desa Bungku, Kecamatan Babujang, Kabupaten Batanghari, Jambi, Minggu (2/11).

Dalam kunjungan selama dua jam, dia menghabiskan waktu hampir satu jam berkeliling di Hutan Harapan yang berdekatan dengan kamp PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki).

Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan, Pangeran Charles banyak menanyakan soal kondisi dan keanekaragaman yang dilihatnya di sepanjang lintasan kunjungan. Menurut Kaban, Pangeran terkesan dengan kekayaan hutan tropis Indonesia.

Saat di akhir lintasan hutan sebelum mendekati kamp, Pangeran Charles, Menhut, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, dan Sean Marrow dari Konsorsium BirdLife terlihat berbincang serius.

Menurut Kaban, mereka membahas berbagai hal yang ditujukan untuk menyelamatkan hutan tropis Indonesia.

PT Reki, perusahaan yang didirikan Konsorsium BirdLife— gabungan dari Royal Society for The Protection of Birds, Burung Indonesia, dan Birdlife International—merupakan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) restorasi Hutan Harapan.

Kawasan hutan produksi eks HPH PT Asilog dan Inhutani V tersebut kini dikelola untuk penghutanan kembali. Selama keanekaragaman hayati belum tercapai, PT Reki hanya boleh mengambil manfaat nonkayu, seperti madu, rotan, atau wisata lingkungan.

Menurut Direktur Eksekutif Burung Indonesia Sukianto Rusli, Hutan Harapan akan menjadi proyek percontohan bagi kegiatan bisnis kehutanan yang tidak berorientasi kayu.

Keberhasilan proyek ini diharapkan bisa memacu investor lain mengelola hutan untuk tujuan pelestarian.

Hutan Harapan berada di Sumatera Selatan dan Jambi. Seluas 52.170 hektar berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, dan seluas 48.180 hektar di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun, Jambi.

Izin pengelolaan Hutan Harapan di Sumsel dari Menhut sudah terbit pada Februari 2008, sedangkan untuk areal di Jambi sampai saat ini masih dalam proses.

Jika areal di Sumsel merupakan eks HPH Inhutani V yang telantar, areal di Jambi merupakan milik PT Asialog yang izinnya masih berlaku sampai tahun 2011.

Akan tetapi, setelah melalui berbagai pendekatan, pemilik PT Asialog, Budi Hartono, kemudian rela tidak menghabiskan konsesinya.

Budi Hartono mengatakan, dia mengembalikan izin HPH Asialog kepada Dephut pada tahun 2004 dan, setelah melalui berbagai proses, akhirnya dinyatakan diterima pada 2007. Dephut kemudian memproses izin ini untuk PT Reki.

Kaban mengatakan, saat ini sudah mulai banyak investor yang meminta izin IUPHHK restorasi. Sedikitnya ada 10 investor yang tengah diverifikasi kelayakannya untuk diberi izin tersebut.

"Ini merupakan kemajuan karena semakin banyak yang sadar bahwa berbisnis kehutanan tidak mesti menebang kayu. Kami akan terus menyiapkan insentif bagi mereka, misalnya, mempercepat proses perizinan keluar," ujar Menhut Kaban. (ham)